



TEORI, METODOLOGI, TEKNIK DAN EPISTEMOLOGI DALAM ILMU PENGETAHUAN

Oleh: Tati Sarihati – Dosen FISIP UNLA

Abstraksi

Teori, metodologi, teknik dan epistemologi memiliki keterkaitan dan tidak terpisahkan dalam membangun konstruksi ilmu pengetahuan. Teori digunakan untuk menyusun konsep konsep dan fakta fakta kedalam suatu pola yang koheren/logis dan untuk memprediksi hasil penelitian yang akan datang. Untuk menegakkan teori, setiap cabang cabang ilmu mengembangkan metodologinya sesuai dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Khasanah teoritis sebuah ilmu selalu dinilai berlandaskan pada pengujian empiris.

Kata Kunci: Teori, Metodologi, Teknik dan Epistemologi

DAFTAR PUSTAKA

Hirsch, Travis & Hanan C, Selvin. 1973. Principles of Survey Analysis. The Mac Millan Company.

Koentjaraningrat. 1985. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia

----- 1981. *Metode Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia*

Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernalogy, Sebuah Rekonstruksi Ilmu pengetahuan. Jakarta: Rineka Cipta

Popper, Karl.R.1983. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. London: The Clarendon Press.

Silalahi, Ulbert. 1999. Metode dan Metodologi Penelitian. Bandung: Bina Budaya

Suryasumantri, Yuyun. 2005. Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer.

Taryadi, Alfons. 1989. Epistemologi Pemecahan Masalah menurut Karl Popper. Jakarta: PT Gramedia

Peursen, Van. 1989. Susunan Ilmu Pengetahuan, Terjemahan BPK Gunung Mulya dan Kanisius

PENGARUH IKLIM ORGANISASI TERHADAPKINERJA APARATUR PEMERINTAH DALAM

RANGKA PELAYANAN KEPENTINGAN UMUM



Oleh: Adjat Daradjat- Dosen LB FISIP UNLA

Pendahuluan

Tidak dapat disangkal bahwa setiap individu dalam kedudukannya sebagai warga negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan masing-masing menginginkan agar kepentingannya tersebut dapat terpenuhi. Namun untuk terpenuhinya sesuatu kepentingan yang cenderung meningkat, tidak jarang harus mengorbankan pihak lain yang juga memiliki intensitas dan dinamika yang terus berkembang. Fenomena tersebut tidak jarang menimbulkan gejala yang mengarah pada terjadinya konflik kepentingan. Untuk menjaga keutuhan sistem dan lebih memungkinkan tercapainya kepentingan-kepentingan, dibentuklah pranata negara yang berfungsi untuk mengatur, menyesuaikan atau menentukan prioritas bagi terpenuhinya kepentingan serta tujuan berbagai pihak.

Di dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis, otoritas negara berasal dari persetujuan rakyat yang diperintah (*authority is derived from the concern of the governed*) Oleh karena itu administrasi negara melalui aparaturnya berkewajiban melayani masyarakat sedemikian rupa, dengan tiga implikasi bagi kinerjanya yaitu : a) setiap warga negara harus dilayani dan tidak memihak, b) semua itu dicapai berlandaskan pada keputusan dan keinginan politik dari lembaga-lembaga perwakilan dan c) bahwa layanan kepentingan tersebut harus bersifat konsisten. (Kumorotomo. 1999, 306)....

DAFTAR PUSTAKA

Bennis, W dan Mische, 1995, Organisasi Abad 21, Re Inventing melalui Re Engineering, Alih bahasa Richmayati dan Siboro, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.

Bill, Creech, 1996, Lima Pilar Manajemen Mutu Terpadu, Alih bahasa Sindoro, A. Dan L. Saputra, Bina Rupa Aksara, Jakarta.

Davis & New Strom, 1996, Perilaku dalam Organisasi, Alih bahasa Agus Dharma, Gelora Aksara Tama/Erlangga, Jakarta.

Frederickson, H. George, 1994, Administrasi Negara Baru, alih bahasa. Al-Ghozei Usman, LP.3 ES, Jakarta.

Holcombe, Arthur.N, 1950, Our More Perfect Union, Harvard University.

Kumorotomo, Wahyudi, 1999, Etika Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada. PT, Jakarta.

LAN-RI, 2000, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah, Jakarta.

Senge, Peter M, 1996, Disiplin ke Lima, alih bahasa Nunuk, Bina Aksara, Jakarta.

Siagian, Sondang.P, 1998, Manajemen Strategik, Bumi Aksara Jakarta.

Simon, Herbert, 1998, Administrative Behaviour, alih bahasa St-Diajung, Bumi Aksara, Jakarta.



Stoner, James, A.F, Manajemen, alih bahasa Alfonsus Sirait, Erlangga, Jakarta.

Thoha, Miftah, 1998, Perilaku Organisasi, Raja Grafindo Perasada, Jakarta.

Winardi, 1997, Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen, Mandar Maju, Bandung.

Whittaker, J.B, 1993, The Government Performance Result Act,

IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI MODEL DESENTRALISASI DI INDONESIA

Oleh: Arnia Fajarwati.- Dosen Fisip Unla

Abstraksi

Desentralisasi sebagai bentuk penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada pemerintah daerah, senantiasa dianut di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelbagai konstitusi dan UUD yang pernah berlaku di Indonesia, cita desentralisasi senantiasa menjadi roh-nya pelaksanaan pemerintahan daerah. Persoalannya adalah masalah implementasi desentralisasi di Indonesia amat beragam, dan seolah-olah tidak konsisten satu sama lain dalam produk undang-undangnya sehingga berpengaruh pada kemamfaatan asas desentralisasi itu sendiri. Padahal dengan desentralisasi akan memberikan peluang otonomi daerah dan akan memandirikan daerah dalam mengatur dirinya sendiri.

Kata Kunci : Desentralisasi, Implementasi Desentralisasi dan Implikasi Desentralisasi.

DAFTAR PUSATAKA

Cheema, G.S, & Rondinelli, D.A., (eds) 1983 Decentralization and Development, Policy Implementation in Developing Countries, Sage Publication, Beverly Hills.

Gaffar, A, 2000, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang, Insist Press, Yogyakarta

Mawhop, Philip, (ed) 1983, Local Government in the Third World the Experience of Tropical Aprica. New York: John Wiley & Sons.

Santoso, S.B., 2000, Prospek dan Tantangan Otonomiu Daerah di bawah Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 : Implikasi, Kendala dan Agenda Kebijakan(Kalam Widyapraja Vol 36, Jakarta.

Smith, B.C. 1985 Decentralization, The Territorial Dimention of The State, George Allen & Unwim, London

Suryaningrat, B, TT, 2000, Pemerintahan dan Administrasi Desa, PT Mekar Djaja, Bandung Sinar Grafika, Sunarno, Siswanto. 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta



Undang-undang Otonomi Daerah 1999 dan Juklak, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Otonomi Daerah 2004 dan Juklak, Sinar Grafika, Jakarta.

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROCESS BUSINESS REDESIGN (BPR)

Oleh: Nia Pusparini - Dosen FISIP UNLA

Abstraksi

Pada eraglobalisasi telah mendorong dan membuka peluang kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal. Pelayanan pada umumnya diberikan melalui beberapa organisasi birokrasi pemerintah pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dari suatu organisasi, baik privat maupun publik. Dalam sistem ini penting bagi organisasi tersebut untuk meningkatkan pelayanannya kepada *stakeholders* yang sangat berperan dalam mempengaruhi kelanjutan keberadaan daripada organisasi tersebut. Bahkan suatu organisasi terutama privat dapat tergusur dari kompetisi jika tidak secara fundamental memastikan bahkan mereka benar-benar melayani pelanggannya dengan lebih baik dari pesaingnya. Organisasi-organisasi tersebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan yang mendorong berkembangnya budaya paternalistik turut memperkeruh sistem pelayanan publik melalui penempatan kepentingan elite politik dan birokrasi sebagai variabel yang dominan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan seringkali mereka memperoleh perlakuan istimewa. Hal ini sering mengusik rasa keadilan dalam masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak wajar oleh birokrasi publik. Struktur birokrasi juga merupakan penghalang terbesar untuk melakukan perubahan pemerintahan. Perubahan struktur hanya bermanfaat jika sejalan dengan strategi untuk perubahan.

Bila suatu organisasi publik hanya memfokuskan diri terhadap perbedaan budaya dan metode antara organisasi pemerintah dan privat, hal ini hanya akan memperlebar kesenjangan retorik antar kedua sektor tersebut. Dengan demikian harus dibina hubungan yang kondusif antara masyarakat dan organisasi publik dengan membuang birokrasi yang kaku. Pemerintah perlu menunjukkan responsivitas pada masyarakat dalam menemukan satu solusi terhadap sistem birokrasi dengan menetapkan misi, visi dan tujuan (secara nasional) yang jelas serta memberi penjelasan dan pengarahan pada masyarakat.

Dalam proses bisnis cara baru (*Business Process Redesign*) para birokrat perlu melakukan transformasi terhadap perubahan agar lebih mendasar. Mereka diminta untuk mengabaikan prosedur dan struktur yang ada dan menggantikannya dengan cara baru untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, melalui pasar atau konsumen adalah kekuatan yang mendorong proses-proses inti. Dalam hal ini pasar dan pelanggan, maka perspektif ini memaksa bisnis untuk melihat aktivitas kegiatannya dari segi pandangan eksternal. Dengan melihat keadaan kegiatan organisasi dari pandangan eksternal organisasi privat maupun publik dapat mengatasi pemikiran yang tradisional yang selama ini mengukungnya.



Kata Kunci: Kualitas Pelayanan Publik, Business Process Redesign (BPR)

DAFTAR PUSTAKA

Carr, David, and Johansson, Henry J. 1995. Best Practices In Reengineering. New York: Mc Graw-Hill, Inc.

Champy, James. 1996. Manajemen Rekayasa Ulang. Alih Bahasa Ir. Agus Maulana M.Sm.. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

De Vrye , Catherine. 1997. Good Service is Good Business 7 Strategi Sederhana Menuju Sukses. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dwiyanto, Agus Dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada Universtity Press.

Heller, Robert. 2002. Essential Managers "Managing Change". Jakarta: PT Dian Rakyat.

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.

Linden, Russel M.1994. Seamless Government "A Practical Guide tomReengineering in the Public Sector".San Francisco: Jossey-Bass Publisher.

Mourier, Pierre and Smith, Martin, Ph.D. 2001. Conquering Organizational Change "How to Succed Where The Most Companiest Fail". Atlanta, Georgia: CEP Press,.

*Namgay, Phuntsho. Quality Service and the Public Sector (WWW document).
URI.<http://www.rim.edu.bt>.*

Raminto, dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wheeler, Pendlebury, Mchugh, Johansson. 1995. Alih bahasa: Agus Maulana. Rekayasa Ulang Proses Bisnis. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Oleh: Tatang Sugandi - Dosen FISIP UNLA

Pendahuluan

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurus SDM adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD (Human Resource Department). Menurut *J.A.F. Stoner* manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu



organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.....

DAFTAR PUSTAKA

Edwin B. Flipppo, Personel Management, 6th Edition, Mc. Graw-Hill, Inc. 1984

Hamellink, C. Cultural Synchronization, New York, Free Press. 1980

James AF. Stoner, Management, 3th Edition, Prentice Hall International, Inc. 1986

ME. Porter, 2nd Edition, Competitive Strategy, New York, Free Press. 1980

Santoso Budi Toto, 2000, The Esserce Of Manajemen Sumber Daya Manusia, Andi And Person Education Asia Pie. Ltd : Yogyakarta

PERAN STRATEGIS HUMAS PEMERINTAHAN DALAM MENCIPTAKAN GOOD GOVERNMENT

Oleh: Indriani – Dosen FISIP UNLA

Abstraksi

Pemberdayaan lembaga humas pemerintah perlu dilakukan dalam pengelolaan informasi kebijakan pemerintah, sehingga berbagai informasi dapat disampaikan pada masyarakat. Citra humas pemerintah perlu diperbaiki dengan peningkatan kemampuan skill di bidang kehumasan. Sementara dalam bidang SDM, perlu adanya sistem rekrutmen yang didasarkan pada kriteria kebutuhan bidang kehumasan. Setelah itu, perlu diselenggarakan sejumlah pelatihan ketrampilan bidang kehumasan yang mampu menunjang skill dan meningkatkan kapasitas petugas dan pejabat humas pemerintah. Humas pemerintah harus mampu melakukan aktivitas komunikasi yang tepat, cepat dan akurat, dalam rangka penyebaran informasi yang utuh, benar dan bermanfaat. Juga mengembangkan jaringan kerja kehumasan antar instansi pemerintah pusat dan antar instansi pemerintah daerah serta memastikan komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang proaktif perlu dilakukan untuk, membangun citra dan reputasi aparatur pemerintah yang baik dan membentuk opini publik menjadi positif.

Kata Kunci ; *Pemberdayaan Humas, jaringan kerja dan Pelayanan Prima*

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, Oemi. 2001. Dasar-dasar Public Relations. Bandung : Penerbitan PT. Citra Aditya Bakti

Kusunastuti, Frida. 2001. Dasar-Dasar Humas . Jakarta : Ghalia Indonesia

http://peran_kerja_humas.com/



http://adimarhaen.multiply.com/journal/item/23/Ruang_Publik_Politis_Komunikasi_Politis_dalam_Masyarakat_Majemuk

[www. Public relations.com](http://www.Publicrelations.com)

SINETRON INDONESIA, DIBALIK LAYAR KACA

(Remaja Dalam Cengkeraman Kapitalisme Mutakhir)

Oleh : Hana Silvana – Dosen FISIP UNLA

Abstraksi

Masa remaja merupakan masa krisis dalam hidup manusia karena di masa ini seseorang mencari jati diri dan mempersiapkan kehidupan di masa berikutnya. Dalam dunia yang semakin berkembang muncul issue besar tentang aging; dalam setiap rentang umur, karakteristik gaya hidup atau budaya dapat dipandang berbeda antar generasi. Remaja merupakan suatu paradoks, ia adalah subyek aktif dalam membentuk budayanya sendiri (youth culture) namun juga merupakan obyek dari “tangan-tangan yang tak terlihat” dan begitu berkuasa untuk menentukan nasib remaja.

Tulisan ini bermaksud untuk menganalisis suatu fragmen artis-artis remaja sebagai obyek yang dikendalikan oleh kekuatan besar di belakang media. Kekuatan ini didorong oleh motif ekonomi mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Imran, Ahda . 2007. Sinetron , Menu anak Selera Dewasa, Artikel Pikiran Rakyat, 23 Juli.

Juli Rachmiatie, Ati, 2006.Makalah Khasanah Lokalitas dalam Tayangan TV sebagai Media Pendidikan dan Hiburan.

Seminar Pemantauan Isi Siaran TV, 27 Februari.

Nielsen AGB Research, 2007. Sinetron Indonesia dan Pembodohan, Talkshow Media Literasi, IMIKI Jabar, 6 Maret.

Silet RCTI, 2007 , Sinetron remaja kita, 21 Juli.

MOTIVASI SEBAGAI FAKTOR YANG MENGERAKKAN DAN MENGARAHKAN PERILAKU

Oleh: Susi Erwina – Dosen FISIP UNLA

Abstraksi



Motivasi mengacu pada factor yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Istilah motivasi mengacu pada sebab atau mengapa dari perilaku. Selain menguatkan organisme , motivasi cenderung mengarahkan perilaku. Upaya untuk menjelaskan tindakan yang dimotivasi mempunyai berbagai keistimewaan diantaranya terdapat dalam *Teori Naluri dan Teori Pengurangan Dorongan* . Teori Naluri mempostulasikan kecenderungan bawaan terhadap tindakan tertentu. Sedangkan Teori Pengurangan Dorongan mendasari motivasi tentang kebutuhan jasmaniah yang menimbulkan ketegangan atau dorongan. Kemudian manusia berusaha mengurangi dorongan dengan melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhan. Kebutuhan biologis menimbulkan tindakan karena tubuh cenderung untuk mempertahankan lingkungan internal (Homeostatis). Homeostatis merupakan kecenderungan tubuh untuk mempertahankan lingkungan internal yang konstan (Misalnya : Orang sehat mempertahankan suhu badannya dalam suhu beberapa derajat, adanya konsentrasi gula darah dalam tubuh dan sebagainya) .

DAFTAR PUSTAKA

Burgess, R.L, & Huston T.I. (Eds.) 1979. Social Exchange in Developing Relationships. New York; Academic Press.

Duck S. & Gilmour R. (Eds.) 1981. Personal Relationships. New York. Academic Press.

Hendrick, C. & Hendrick, S. 1983. Liking, Loving, and Relating. Monterey, CA : Brooks/Cole.

Kelley H.H, and friends 1983. Close Relationships. New York : WH. Freeman .

Rubin Z. 1980. Children's friendships. Cambridge, MA. Harvard University Press.

Walster E, & Walster, GW. 1978. A New Look at Love. Reading, MA.: Addison Wesley.

Rita L. Atkinson & Richard C. Atkinson. 1983. Introduction to Psychology, Eight Edition. Harcourt Brace Jovanovich, Inc.

Sommer, R. 1969. Personal Space : The Behavioral Basis for Design. Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall.

REFORMASI BIROKRASI MENUJU GOOD GOVERNANCE

Oleh : Achdijat Sulaeman- Dosen FISIP Universitas Al Ghifari

Abstraksi

Ketatnya persaingan, tuntutan tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam seluruh kegiatan pemerintah dan pembangunan tidak dapat dielakkan lagi. Namun demikian, penerapan tata pemerintahan yang baik tidak semata-mata karena adanya proses globalisasi tersebut. Ada tidak adanya globalisasi, tata pemerintahan yang baik tetap diperlukan, bahkan sejak suatu organisasi pemerintahan atau negara dibentuk. Tata pemerintahan yang



baik meliputi tata pemerintahan yang baik untuk sektor publik (good public governance) dan tata kelola/keperintahan yang baik untuk dunia usaha swasta (good corporate governance). Tulisan ini hanya difokuskan kepada tata pemerintahan yang baik untuk sektor publik saja.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

1. *UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan;*
2. *UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;*
3. *UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;*
4. *UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*
5. *UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;*
6. *UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan*
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. *UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;*
8. *UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;*
9. *UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);*
10. *UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;*
11. *UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;*
12. *UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PRATUN);*
13. *UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;*
14. *UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.*

PERATURAN PEMERINTAH



1. *PP No. 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan tata Cara Peran Serta Masyarakat*

dalam Penataan Ruang;

2. *PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;*

3. *PP No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;*

4. *PP No. 19 Tahun 2000 Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;*

5. *PP No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan*

dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

6. *PP No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;*

7. *PP No. 2 Tahun 2001 Tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat*

Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

8. *PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;*

9. *PP No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;*

10. *PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;*

11. *PP No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;*

12. *PP No. 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;*

13. *PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;*

14. *PP No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;*

15. *PP No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.*

PERATURAN PRESIDEN

1. *Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk*

Kepentingan Umum;



2. *Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun (RPJM) 2004-2009;*

3. *Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2005 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006;*

4. *Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;*

5. *Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;*

6. *Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 Tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam*

Penyediaan Infrastruktur;

7. *Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2006 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007.*

KEPPRES

1. *Keppres No. 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;*

2. *Keppres No. 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;*

3. *Keppres No. 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan*

Kemiskinan;

4. *Keppres No. 80 Tahun 2006 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.*

INPRES

1. *Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;*

2. *Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;*

3. *Inpres No. 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.*

PENTINGNYA HUMAN RELATIONS DALAM ORGANISASI

Oleh: Deden Suhendar -. Dosen Universitas Al Ghifari

Pengertian *Human Relations*



Sebagai makhluk sosial, manusia menyadari bahwa ia tidak dapat memisahkan diri dari kehidupan masyarakat, ia membutuhkan pertolongan orang lain, bahkan dengan mengadakan interaksi sosial, pengetahuan dan pengalamannya bertambah. Oleh karena itu, hubungan sosial dengan sesama manusia, baik secara perorangan maupun kelompok, secara harmonis dan efektif sangat diperlukan, lebih-lebih sebagai seorang administrator atau manajer yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan organisasi, harus mampu bergaul dan memiliki kemampuan serta keterampilan dalam membina bawahannya.

Di negara-negara yang sudah maju, hubungan antar manusia atau *human relations* semakin mendapatkan perhatian para pemimpin dalam jenis dan jenjang organisasi apapun. Oleh karenanya, hubungan antar manusia semakin dirasakan penting kehadirannya dalam rangka memecahkan berbagai masalah yang menyangkut faktor manusia.

Bentuk-bentuk psikologis dan konflik-konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi sering terjadi, bukan saja antara manajer dengan karyawan, benar-benar dapat mengganggu jalannya organisasi dalam mencapai tujuan.....

DAFTAR PUSTAKA

Arifin Abdulrachman, 1979, *Human Relations untuk Manajemen (teori dan praktek)*, LAN RI: Bandung

Astrid S. Susanto, 1974, *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*, Binacipta: Bandung

Dubin, 1977, *Human Relations in Administration*, Prentice Hall of India: New Delhi

Fautino Cardoso Gomes, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset: Yogyakarta

Miftah Thoha, 1983, *Aspek-aspek Pokok Ilmu Administrasi*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Oemi Abdurachman, 1982, *Human Relations & Public Relations*, Alumni: Bandung

-----, 1988, *Hubungan Insani*, Remaja Karya: Bandung

Siagian, Sp., 1982, *Filsafat Administrasi*, Bina Cipta: Jakarta

Soebagio Sastrodiningrat, 1979, *Perilaku Administrasi*, Karuniaka UT: Jakarta

Soewarno Handayaniingrat, 1979, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Suriakusumah, 1979, *Peranan Human Relations dan Public Relations dalam Organisasi Kerja*, LAN RI: Bandung

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PRINSIP MENGENAL NASABAH TERHADAP PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG



(Studi Tentang Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 di PT Bank Central Asia, Tbk. Bandung)

Oleh: Nunung Hastika- Dosen FISIP UNLA

Pendahuluan

Masalah pencucian uang makin mendapat perhatian khusus dari dunia internasional, dipicu dengan semakin maraknya tindak kejahatan dari waktu ke waktu, sementara banyak negara yang belum menetapkan sistem hukum untuk memerangi atau menetapkan kejahatan yang harus diberantas. Kejahatan pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara. Jaringan kejahatan pencucian uang menjadi universal dan dapat menembus batas-batas yuridiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional.

Pengertian pencucian uang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 adalah perbuatan dalam hal menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, menukarkan, membawa ke luar negeri, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, S.. 1997. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Bacal, Robert. 2002. Performance Management. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Bromley, Daniel W. 1989. Economic Interest and Institution. The Conceptual Foundation of Public Policy. Oxford: Basit Black Well.*
- Dunn, William N. 1981. Public Policy Analysis. An Introduction. New Jersey: Prentice Hall.*
- . 2000. *Analisa Kebijakan Publik. Alih Bahasa: Darwin Muhajir. Edisi ke II. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.*
- Dye, Thomas R. 1987. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall.*
- Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.*
- Effendy, Onong. U. 1984. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Fuady, Munir. 2004. Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih). Bandung: Citra Aditya Bakti.*



- Gibson, James, L. et all. 1990. *Organisasi. Jilid I. Perilaku, Struktur, Proses, terjemahan Djoerban Wahid. Jakarta: Erlangga.*
- Islamy, M. Irfan. 1993. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Karunika III.*
- Jenkin, W.I. Martin Robertson. 1978. *Policy Analysis. Oxford: Boston Press.*
- Koentjaraningrat, 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Edisi ke Tiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.*
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Niaga. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa*
- Mukaram, Marwansya. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pusat Penerbit Administrasi Niaga.*
- Nazir, Moh. 1993. *Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.*
- Nawawi, H. Hadari. 1998. *Pengawasan Melekat di Aparatur Pemerintah. Jakarta: Erlangga.*
- Ndara, Talizihu, 1997, *Pengantar Teori Pengembangan SDM, Rineka Cipta, Jakarta*
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.*
- Riswandi, Budi Agus. 2003. *Hukum Internet di Indonesia Yogyakarta: UII Press.*
- Kaplan, Robert M. and Dennis P. Saccuzza. 1993. "Psychological Testing (Principles, Applications and Issues)" 3rd edition. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Robbin, Stephen P. 1979. *Organizational Behaviour: Concept, Controversies, and Application, International Editions. New York: Prentice Hall.*
- Rusidi. 1991. *Filsafat Ilmu dan Berpikir Ilmiah. Bandung: Fakultas Pertanian Unpad.*
- Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan Bandung: Mandar Maju.*
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.*
- Siagian, Sondang P. 2000. *Teori Perkembangan Organisasi Jakarta: Bumi Aksara.*
- Steer, Richard M. 1980. *Efektivitas Organisasi (Terjemahan Magdalena Jamin). Jakarta: Erlangga.*
- Sudjana. 1996. *Metode Statistik. Bandung: Torsito.*
- Syahdeini, Sutan Remy. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.*



Tampubolon, Robert. 2004. Manajemen Risiko. Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Thoha Miftah. 1990. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Press.

Thornhill, William T. 1989. Effective Risk Management for Financial Organizations, Bank Administration. Illinois: Institute Rolling Meadows.

Umar, Husein. 2001. Manajemen Risiko Bisnis – Pendekatan Finansial dan Non Finansial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dokumen:

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Fokusmedia

REVOLUSI INTEGRATIF : SENTIMEN SENTIMEN PRIMORDIAL DAN POLITIK SIPIL DI NEGARA NEGARA BARU

Oleh: Dudung Abdurroup – Dosen FISIP UNLA

Pendahuluan

Ketegangan yang muncul di negara-negara baru antara memelihara identitas diri atau golongan yang diakui masyarakat dengan keinginan membangun sebuah komunitas nasional yang kuat merupakan suatu gejala yang terjadi dimana-mana. Di negara-negara baru yang berusaha untuk memapankan sebuah pola politik terjadi pertentangan antara loyalitas-loyalitas primordial dengan tatanan sipil.

Regionalisme pusat – pinggiran dan kepemimpinan ganda di Indonesia, persatuan antar ras dalam satu partai di Malaysia, asimilisionisme agresif yang terbungkus dalam legalisme konstitusional di Burma, sebuah partai pusat yang bersifat kosmopolitan dengan mesin-mesin propinsi yang berhadapan dengan banyak front melawan setiap macam parokialisme di India, penyusunan daftar sektarian dalam pemerintahan di Lebanon, pemerintahan otokratis berwajah ganda di Maroko, dan latihan sepak bola uji keseimbangan di Nigeria. Adalah beberapa kasus terjadinya usaha-usaha menyelesaikan masalah yang disebabkan adanya sentimen-sentimen primordial berhadapan dengan politik sipil di negara-negara baru, atau dalam istilah Clifford Geertz disebut dengan "Revolusi Integratif".

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman wahid, 1999, Membangun Demokrasi, Bandung, Remaja Rosdakarya.



Althoff, Phillip & Michael Rush, 1997, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta: Rajawali Press.

Amien Rais, 1998, Politik Adiluhung: Menumbuhkan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Bandung: Zaman wacana Mulia.

Aderson Benedict, 1999, Komunitas-komunitas Imajiner : Renungan Tentang Asal Usul dan Penyebaran Nasionalisme, Yogyakarta : Pustaka Pelajar dan Insist Press.

Bertram, Christoph, 1988, Konflik dunia Ketiga dan Keamanan Dunia, Terjemahan A. Hasymi ali, Jakarta : Bina Aksara.

Blondel, J., 1995, Comparative Government : an Introduction (Second Ed.) Prentice Hall, University Cambridge Press.

Breuilly, John, 1985, Nationalism and The State, Chicago : University of Chicago Press.

Dahl, Robert A., 1991, Modern Political Analysis (Fifth Ed.), Prentice Hall International Editions, Yale University

Duverger, Maurice, 1993, Sosiologi Politik, Jakarta: rajawali Press

Evers, Hans-Dieter, (Edit), 1988, Teori Masyarakat : Proses Peradaban dalam sistem Dunia Modern, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Geertz, Clifford, 1974, The Interpretation of Cultures : Selected Essay, London: Hutchinson & CD Publisher, Ltd

Iver, Mac, 1984, Negara Modern, Terjemahan Moertono, Jakarta: Bina Aksara

Muhammad A.S. hikam, 1996, Demokrasi dan Civil Society, Jakarta, LP3Es

Sanderson, Stephen, K., 1973, Sosiologi Makro, Jakarta: Rajawali Press

Smith, Anthony, D., 1973, the Concept of Social Change, London: Routledge and Kegan Paul.

-----, 1981, The Ethnic Revival, Cambridge: Cambridge University Press.